

# STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KONFLIK BERNUANSA AGAMA GUNA MEMPERTAHANKAN STATUS ZERO CONFLICT DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2018

## STRATEGIES OF REGIONAL GOVERNMENTS IN PREVENTION OF RELIGIOUS- RELATED CONFLICT TO MANTAIN ZERO CONFLICT IN SOUTH SUMATRA 2017-2018

Elya Tanzila <sup>1</sup>, Siswo Hadi Sumantri <sup>2</sup>, Bambang Wahyudi <sup>3</sup>

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan

(elyatanzila@gmail.com)

**Abstrak** - Sumatera Selatan tercatat sebagai Provinsi yang *zero conflict*. Dalam hal ini, *zero conflict* mengacu pada kondisi damai yaitu belum ditemukan adanya konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) di Sumatera Selatan. Sejauh ini, Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik bernuansa agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik bernuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep *Conflict early Warning and Early Response System* (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sumatera Selatan masih berada pada level damai negatif. (2) Strategi yang digunakan pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik bernuansa agama yaitu melalui tiga tahap: pertama, menjadikan *zero conflict* sebagai tujuan (*ends*); kedua, menggunakan teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan (*means*); dan ketiga, menggunakan UU Penanganan Konflik Sosial No.7 Tahun 2012 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 sebagai acuan untuk melakukan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme, optimalisasi peran lembaga keagamaan, meningkatkan sinergitas antar lembaga, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat sebagai cara (*ways*) untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, pemerintah Sumatera Selatan harus mampu meningkatkan kondisi masyarakat Sumatera Selatan agar tercipta damai positif.

**Kata Kunci:** Strategi, Pencegahan Konflik, Konflik SARA, Konflik Bernuansa Agama, Zero Conflict

**Abstract** - South Sumatra has known as a zero conflict Province. In this case, zero conflict refers to the conditions of peace where there is no ethnic-religious-racial-and inter-group conflict in South Sumatra. Thus far, South **Abstract** - Sumatra has never experienced religious-related conflict. This research aims to explain about the strategy of the South Sumatra regional government in prevention of religious-related conflict. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Cohort 6).

<sup>2</sup> Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT. adalah dosen tetap Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.Si., M.M. adalah dosen tetap Universitas Pertahanan.

qualitative explanation methods. For data collection techniques, researcher conducts interview procedures, observations and documentation related to the topic. This research theoretically has built with strategy theory, peace theory, conflict theory, conflict prevention concept, Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS) Concept, and the concept of national defense. This result shows that: (1) South Sumatra is still at a level of negative peace. (2) The strategy used by the South Sumatra regional government in preventing religious-related conflict was through three stages: ends, means, and ways. First, establish zero conflict as goal (ends); second, using technology and empowering human resources as facilities and infrastructure to achieve goals (means); and third, using Social Conflict Management Act number 7 of 2012 and Joint Regulation of Minister of Home Affairs and Minister of Religion Number 9 and 8 of 2006 as a reference to socialize the dangers of terrorism and radicalism, optimizing the role of religious institutions and to increase synergy between institutions as ways to achieve goals. At the end, the government of South Sumatra must be able to improve the condition of the South Sumatra society in order to create positive peace.

**Keywords: Strategy, Conflict Prevention, Ethnic-Religious-Racial- and Inter Group Conflict, Religious-Related Conflict, Zero Conflict**

## Pendahuluan

**K**eamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya serta segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, terciptanya keamanan nasional juga sangat penting guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Dahulu, ancaman keamanan nasional lebih banyak bersumber dari ranah militer

seperti peperangan, invasi militer, agresi oleh negara lain, sabotase, pemberontakan bersenjata, maupun spionase. Sekarang, ancaman yang dihadapi oleh suatu negara lebih berbentuk ancaman non militer dan hibrid. Urgensi keamanan sudah beralih ke isu-isu kontemporer seperti ancaman globalisasi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan siber, maupun konflik komunal.

Ancaman yang mengganggu stabilitas dan integrasi nasional pun kini lebih banyak berasal dari dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara yang seringkali menghadapi berbagai dilema keamanan yang berasal dari dalam negeri. Salah satu ancaman nyata yang dihadapi oleh Indonesia adalah konflik SARA (Suku,

Agama, Ras, dan Antar Golongan). Konflik SARA menjadi salah satu ancaman faktual yang telah, sedang, dan akan terus membayangi bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kemajemukannya. Tercatat pada Juli 2017, jumlah populasi di Indonesia mencapai 260 juta jiwa dan merupakan peringkat ke-4 populasi terbanyak di dunia.<sup>4</sup> Banyaknya populasi di Indonesia berbanding lurus dengan banyaknya suku yang tersebar di sepanjang wilayah Indonesia. Adapun presentase suku-suku besar yang berkembang di Indonesia, di antaranya yaitu: 40% Suku Jawa, 15,5% Sunda, 3,7% Melayu, 3,6% Batak, 3% Madura, 2,9% Betawi, 2,7% Minangkabau, 2,7 % Bugis, 2% Banten, 1,7% Banjar, 1,7% Bali, 1,4% Aceh, 1,4% Dayak, 1,3 % Sasak, 16,2% suku-suku lain.<sup>5</sup>

Selain itu, keberagaman Indonesia juga dapat dilihat dari sisi agama. Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan 6 agama besar, yaitu: Islam

(sebanyak 87, 2% dari total penduduk), Protestan (7%), Katholik (2.9%), Hindu (1.7%), Budha dan Konfusius (0,9%).<sup>6</sup> Oleh karena itu, Toynbee memberikan julukan kepada Indonesia “*The land where the religions are good neighbors*”.<sup>7</sup>

Keberagaman dan kemajemukan Indonesia dalam hal suku, agama, kesenian, tradisi, kebudayaan, dan pandangan nilai yang dianut tersebut dapat menjadi nilai positif dan konstruktif. Akan tetapi disisi lain, apabila pemerintahan tidak dapat mengelola pluralitas tersebut dengan baik, perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi negatif dan destruktif.<sup>8</sup> Akibatnya, bukan persatuan dan kesatuan negara yang didapat melainkan disintegrasi bangsa.

Konflik bernuansa SARA memang mudah sekali muncul. Hal tersebut terjadi karena menurut Brock, kesukuan adalah cara termudah untuk membakar emosi dan naluri primordial.<sup>9</sup> Sementara itu, menurut Clifford Geertz, agama merupakan unsur

---

<sup>4</sup> Central Intelligence Agency, “The World Factbook”, dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>, diakses pada 7 Agustus 2018.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Arnold J Toynbee dalam Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat*

*Beragama*, (Jakarta:Departemen Agama, 1982), hlm. 46.

<sup>8</sup> Bend Abidin Santosa, *Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik*, (Jurnal Aspikom Volume 3 Nomor 2 Januari 2017), hlm. 199-214.

<sup>9</sup> Lothar Brock dalam Dewi Fortuna Anwar, *Konflik Kekerasan Internal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 391.

perekat yang dapat menimbulkan baik persatuan maupun perselisihan<sup>10</sup>. Untuk mengatasi konflik SARA yang selalu berpotensi hadir menggerogoti integritas bangsa, pemerintah Indonesia secara umum dan pemerintah daerah khususnya harus segera menemukan formula atau strategi yang tepat guna mengatasi konflik SARA.

Menyikapi terkait formula atau strategi tersebut, Sumatera Selatan tercatat sebagai provinsi yang *zero conflict*. Dalam hal ini, *zero conflict* mengacu pada kondisi damai artinya tidak ditemukan konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) di Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan yang memiliki penduduk sekitar 8,05 juta jiwa merupakan wilayah yang sangat pluralistik.<sup>11</sup> Pluralitas tersebut disebabkan karena keberagaman agama, suku, budaya, dan juga adat istiadat yang dimilikinya. Dengan berbagai keragaman ini, tentunya dapat menjadi peluang dan potensi munculnya perbedaan yang dapat dan berakibat pada munculnya konflik sosial.

Sumatera Selatan tercatat memiliki penduduk yang memeluk agama beragam. Di tahun 2017, persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16%, Budha 1,53%, Khatolik 1,29%, Kristen 1,16% dan Hindu 0,86%.<sup>12</sup>

Keberagaman agama di Sumatera Selatan tidak menyeret provinsi ini ke dalam sebuah konflik bernuansa agama walaupun memiliki penduduk dengan agama yang beragam dan mayoritas penduduknya beragama muslim. Sejauh ini, Sumatera Selatan belum pernah mengalami konflik kekerasan yang mengatasnamakan SARA terutama agama. Kondisi tersebut mendorong mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin mendeklarasikan Sumatera Selatan sebagai daerah yang *zero conflict*.

Melihat fenomena yang dijelaskan tersebut, peneliti merasa bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik bernuansa

---

<sup>10</sup>Clifford Geertz dalam Taufik Abdullah (ed.) *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 67.

<sup>11</sup> Badan Pusat statistik Sumatera selatan, *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka tahun 2017*, (Palembang: BPS Sumatera Selatan, 2017), hlm. 71.

<sup>12</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Profil Provinsi Sumatera Selatan", dalam <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/Profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> diakses pada 22 Juli 2018.

agama guna mempertahankan status *zero conflict* di Sumatera Selatan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konflik dengan turunannya berupa teori SAT (*Source, Accelerator, Trigger*) Ihsan Malik untuk menjelaskan mengapa suatu insiden dapat menimbulkan konflik di daerah lain, namun tidak di Sumatera Selatan; Teori Damai Johan Galtung untuk menentukan damai positif atau damai negatif yang telah terjadi di Sumatera Selatan; Teori Strategi oleh Arthur Lykke dengan didukung konsep pencegahan konflik dan konsep *Conflict Early Warning and Early Response System* (CEWERS) untuk merumuskan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama guna mempertahankan status *zero conflict*; Terakhir, Peneliti menggunakan konsep Pertahanan Negara untuk menganalisis dampak positif kondisi *zero conflict* di Sumatera Selatan berkaitan dengan pertahanan negara Indonesia.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kondisi damai (*Zero Conflict*) di Sumatera Selatan**

Provinsi Sumatera Selatan telah dikenal luas sebagai wilayah yang aman dan kondusif. Keadaan aman tersebut terutama disebabkan karena nihilnya konflik atau kekerasan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) terutama konflik bernuansa agama. Kondisi damai tersebut kemudian dikenal dengan sebutan *zero conflict*.

Status atau predikat *zero conflict* tersebut awal mulanya dicetuskan pada tahun 2017 oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang menjabat sebagai gubernur Sumatera Selatan selama 2 (dua) periode. Selama menjabat sebagai Gubernur, Alex Noerdin dengan gencar selalu mempromosikan kondisi damai (*zero conflict*) di wilayah Sumatera Selatan. Bukan hanya mempromosikan Sumatera Selatan *zero conflict* di kancah nasional namun juga di kancah internasional. Salah satu usaha promosinya ialah pada bulan september 2017, ketika Menko Polhukam Wiranto menghadiri kegiatan apel akbar 5000 mahasiswa se-Sumatera Selatan di kampus

UIN Raden Fatah Palembang, Wiranto sangat mengapresiasi kondisi *zero conflict* di Sumatera Selatan.<sup>13</sup>

Promosi gencar yang dilakukan oleh Alex Noerdin terkait *zero conflict* Sumatera Selatan bukan sekedar “komoditi politik” semata. Karena pada kenyataannya Sumatera Selatan memang tidak pernah mengalami konflik SARA terutama konflik bernuansa agama.

Konflik agama sendiri jika ditinjau dari jejak histori konflik/kekerasan yang terjadi di Indonesia selama ini, terbagi menjadi tiga kategori: Pertama, konflik antar umat beragama. Kedua, Konflik intern umat beragama. Dan yang terakhir adalah konflik antara umat beragama dengan aliran yang dianggap sesat.<sup>14</sup> Untuk kategori pertama, pelanggaran yang paling banyak yaitu hanya menyangkut soal pendirian rumah ibadat. Walaupun di beberapa provinsi konflik antar umat beragama yang terjadi lebih dari sekedar izin pendirian rumah ibadat. Sebagai contoh yaitu konflik agama di

Maluku dan Poso yang menelan begitu banyak korban jiwa.

Konflik yang kedua yaitu intern umat beragama. Sejauh ini di Indonesia konflik intern umat beragama sangat jarang sekali terjadi. Namun salah satu kasus yang paling terkenal yaitu konflik antara Sunni-Syiah di Sampang Madura. Dan kategori konflik terakhir yaitu antar umat beragama dengan aliran yang dianggap sesat. Untuk kategori terakhir ini, bisa diambil contoh yaitu konflik yang terjadi antara umat muslim dan Ahmadiyah.

Potensi konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan hingga saat ini masih menyentuh pada taraf pembangunan rumah ibadat. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, yaitu perselisihan pembangunan Vihara di Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa. Ternyata setelah diselidiki, perselisihan tersebut terjadinya karena adanya masalah perizinan atas pembangunan Vihara tersebut. Selain itu, pada 8 Maret 2018 terdapat kasus perusakan gereja Santo Zakaria di Ogan ilir

---

<sup>13</sup>Tribun News, “Wiranto puji Alex Noerdin Wujudkan Sumatera Selatn Zero Conflict”, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/29/wiranto-puji-alex-noerdin-wujudkan-sumatera-selatan-zero-conflict> diakses pada 20 November 2018.

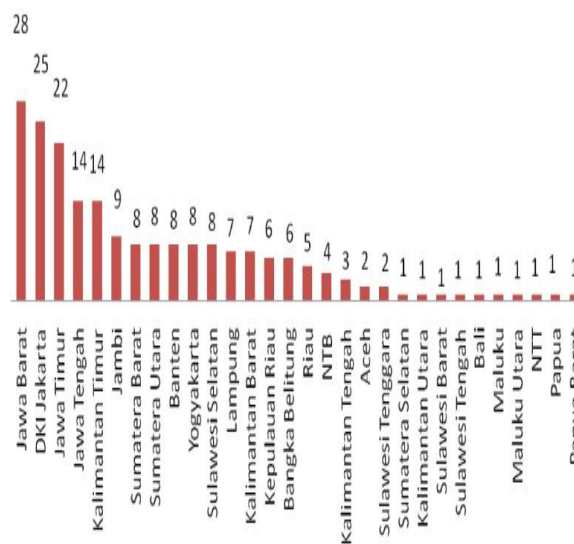
<sup>14</sup>Muqoyyidin, Andik Wahyun, *Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikansi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif*, (Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012), hlm: 315.

yang dapat berpotensi pada perpecahan umat. Namun setelah diteliti, masalah tersebut bukanlah murni konflik antar umat beragama. Melainkan tindakan kriminal perusakan rumah ibadat umat kristen yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Potensi konflik lain yang ada di Sumatera Selatan yaitu tumbuh dan berkembangnya aliran-aliran yang terlarang di Indonesia. Yaitu seperti Gerakan Fajar Nusantara dan Ahmadiyah. Menurut Rivai Saidi, staff Kanwil Kementerian Agama Sumsel, kedua gerakan tersebut tidak dapat dipungkiri ada di Sumatera Selatan. Hanya saja, hingga saat ini pergerakan mereka masih senyap. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumatera Selatan harus tetap mewaspadaai dan mengawasi pergerakan aliran-aliran sejenis yang sekiranya mampu memicu konflik dalam masyarakat.

Minimnya kasus pelanggaran kebebasan beragama di Sumatera Selatan tersebut juga dibuktikan dengan data yang dilaporkan oleh The Wahid Institute berkaitan dengan pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dari 30 provinsi yang disurvei, Sumatera Selatan bersama dengan 9 provinsi lain menduduki

peringkat terakhir atas banyaknya jumlah pelanggaran KBB yang terjadi di provinsi masing-masing.



**Gambar 1.** Jumlah Peristiwa Pelanggaran KBB berdasarkan wilayah  
Sumber: The Wahid Institute, 2016.

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa kasus pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 hanya terjadi satu kali. Hal ini tentu harus tetap menjadi perhatian penuh pemerintah karena jika hal tersebut di atas tidak diatasi dengan optimal, bisa saja akan merembet kepada kekerasan yang lebih luas seperti halnya insiden yang terjadi di Ambon.

Tingkat kerukunan beragama masyarakat di wilayah Sumatera Selatan saat ini masih tergolong tinggi. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Litbang dan dan Diklat Kementerian Agama RI, rata-rata

kerukunan nasional umat beragama yaitu mendapat skor 75,36. Tingkat kerukunan tersebut dinilai dari tiga dimensi utama, yaitu: Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama. Pada masing-masing dimensi tersebut terbagi lagi menjadi sub-sub dimensi yang menjadi tolak ukur penilaian Kementerian Agama terhadap tingkat kerukunan di Indonesia. Sumatera Selatan menduduki peringkat 15 dengan skor 75,2 pada tahun 2015. Adapun 14 provinsi di Indonesia yang mendapat skor di atas rata-rata nilai nasional, diantaranya yaitu: NTT, Bali, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan NTB.

Pemerintah Sumatera Selatan membutuhkan upaya yang optimal untuk tetap menjaga kerukunan dan bahkan meningkatkan indeks kerukunan di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan sampai apa yang terjadi di beberapa daerah juga ikut terjadi di Sumatera Selatan. Seperti halnya konflik agama yang terjadi di Ambon pada tahun 1998 dan mengakibatkan banyak korban jiwa.

Apabila dianalisis menggunakan teori SAT (Struktural, Akselerator, *Trigger*), ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa suatu insiden (*trigger*) yang sama bisa menyebabkan konflik kekerasan di suatu daerah namun tidak berpengaruh di daerah lain.

Sebagai contoh, pembakaran atau perusakan rumah ibadat di Ambon menjadi salah satu *trigger* yang menyeret pada kekerasan massal dan beruntun. Hal tersebut dikarenakan ada begitu banyak konflik struktural yang terjadi di ambon seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang menyebabkan polarisasi berdasarkan keagamaan dalam rekrutmen jabatan-jabatan, dan diskriminasi yang dirasakan baik oleh umat Islam maupun Kristen. Faktor struktural yang begitu kental dirasakan oleh masyarakat tersebut membuat insiden-insiden kecil yang terjadi di Ambon menjadi *trigger* dan akselerator terjadinya kekerasan di Ambon.

Berbeda halnya dengan kondisi di Sumatera Selatan yang memang sudah relatif aman dan kondusif. Karakteristik masyarakat sumatera Selatan yang saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan, tradisi hidup berdampingan



secara damai antar suku dan agama yang berbeda, sikap beragama masyarakat Muslim dan Kristen yang moderat, tidak radikal serta adanya ungkapan “tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu” merupakan beberapa alasan mengapa hingga saat ini Sumatera Selatan tetap kondusif.

Beberapa festival yang ada di Sumatera Selatan juga menjadi ajang pertemuan dan secara tidak langsung meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat. Seperti festival tahun baru imlek yang setiap tahun rutin dilaksanakan di Pulau Kemaro di Sumatera Selatan. Tidak hanya warga Tionghoa atau Budha yang datang, melainkan banyak juga warga Muslim yang berbondong-bondong untuk menikmati festival yang digelar di sebuah pulau kecil di tengah sungai Musi.

Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi modal kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan. Sehingga, insiden-insiden kecil yang terjadi seperti perusakan rumah ibadat gereja Santo Zakaria di Rantau Alai Sumatera Selatan tidak menjadi *trigger* terjadinya perpecahan antar umat yang lebih besar. Selain itu, faktor kesigapan pemerintah juga menjadi alasan utama.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai instansi dan organisasi yang ada dapat langsung mengatasi hal-hal yang demikian dengan cepat.

Apabila dilihat dari kondisi antar umat beragama dan antar suku di Sumatera Selatan, memang dapat dikatakan Sumatera Selatan merupakan wilayah yang damai atau lebih dikenal dengan *zero conflict*. Akan tetapi pengertian damai yang seperti itu, menurut Galtung dimaknai sebagai damai negatif. Damai negatif yaitu dimana kondisi saat potensi transformasi konflik menjadi kekerasan fisik berhasil dikendalikan. Namun hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kondisi damai absolut, karena damai negatif masih memiliki kekerasan yang terjadi baik secara struktural maupun kultural. Bagi Galtung, damai yang ideal adalah hilangnya kekerasan secara total, bukan hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan struktural dalam birokrasi dan kekerasan kultural dalam pola pikir manusia. Damai positif mengedepankan situasi dimana keadilan, kesetaraan, dan penghargaan atas hidup itu sendiri. Situasi dimana manusia hidup secara harmonis tanpa ada keinginan untuk menundukkan,

menguasai, atau bahkan mematikan hak hidup orang lain.

Menurut teori damai yang dijabarkan oleh Johan Galtung, damai yang terjadi Sumatera Selatan baru sebatas damai negatif. Yaitu tidak adanya kekerasan fisik yang terjadi dalam konteks SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Apabila diteliti lebih dalam lagi, ada beberapa masalah struktural yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Sumatera Selatan. Seperti kemiskinan dan kriminalitas.

Bahkan menurut data Badan Statistik Pusat (BPS), tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional.

Bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan mencapai 12,8% dari total penduduk yang ada di Sumatera Selatan. dan Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 16 provinsi yang memiliki presentasi jumlah penduduk miskin lebih tinggi dibanding dengan presentase rata-rata jumlah penduduk miskin di Seluruh Indonesia yang hanya mencapai angka 9.82%.

Tolak ukur lain yang menjadi penilaian atas level kondisi damai pada suatu daerah yaitu tingkat kriminalitas. Adanya kriminalitas yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut masih berada pada level damai negatif. Sumatera Selatan merupakan daerah yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Menurut Kapolda Sumatera Selatan Irjen Zulkarnain Adinegara, warga Sumatera Selatan menjadi korban tindak kejahatan per 39 menit pada tahun 2018. Walaupun angka tersebut menurun dibanding tahun 2017 yaitu tindak kejahatan terjadi setiap 33 menit. Selain itu, aksi curas dengan senjata api tercatat ada sebanyak 32 kasus dan hanya bisa diselesaikan sebanyak 14 kasus. Angka tindak pidana sepanjang 2018 mencapai 13.217 kasus.<sup>15</sup>

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat di Sumatera Selatan dapat menikmati kesejahteraan hidup dan keadilan ekonomi seperti yang disyaratkan Johan Galtung untuk mendapat predikat “damai positif”.

---

<sup>15</sup> Nefri Inge. Liputan 6, “22 Pelaku Kriminalitas di Sumsel Ditembak Mati Sepanjang 2018”, dalam <http://www.liputan6.com/pelaku-kriminalitas-di->

[sumsel-ditembak-mati-sepanjang-2018/](http://sumsel-ditembak-mati-sepanjang-2018/) diakses pada 7 Desember 2018.

## **Strategi Pemerintah Sumatera Selatan dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama**

Keberhasilan Sumatera Selatan dalam mewujudkan *zero conflict* yang ada di wilayahnya tentu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dibutuhkan koordinasi dan sinergitas dari semua kalangan baik pemerintah daerah, instansi/lembaga, tokoh agama, akademisi, dan bahkan masyarakat. Untuk itu, Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan berbagai strategi yang dapat dijalankan guna mencegah terjadinya konflik SARA terutama konflik bernuansa agama di wilayah Sumatera Selatan.

Menurut Nicolas dan Mikael, model pencegahan konflik memiliki dua bentuk, yaitu pencegahan konflik secara langsung (*direct prevention*) dan pencegahan konflik secara struktural (*structural direction*). Apabila dianalisis menggunakan model tersebut, pencegahan konflik bernuansa agama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan lebih kepada pencegahan konflik yang bersifat langsung (*direct prevention*).

Upaya pencegahan konflik yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah

Sumatera Selatan hanya sebatas meredam potensi konflik yang kemungkinan akan meledak menjadi sebuah kekerasan langsung. Belum ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi potensi konflik dari akar rumput. Dengan kata lain, pemerintah belum melakukan pencegahan konflik secara struktural.

Beberapa pencegahan konflik secara langsung yang telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan yaitu melaksanakan peringatan dini dan respon dini pada isu-isu yang dinilai dapat memicu terjadinya konflik bernuansa agama. Salah satu bentuk peringatan dini yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai elemen yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Sosialisasi mengenai hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi polemik yang dihadapi oleh masyarakat global belakangan ini terkait isu terorisme dan radikalisme.

Bentuk pencegahan konflik secara langsung lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melaksanakan respon dini terkait potensi konflik yang terindikasi dapat menimbulkan konflik bernuansa agama. Salah satu bentuk

respon dini yang dilakukan adalah dengan merespon suatu konflik dengan cepat tanggap. Perusakan gereja Santo Zakaria di Ogan Ilir pada tahun 2018 menjadi salah satu bentuk respon dini yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan. Dalam menangani kasus tersebut, Polri dan TNI di Sumatera Selatan bergerak mengusut kasus tersebut kurang dari 24 jam sejak kejadian berlangsung. Kesigapan tersebut tentu sangat penting karena perusakan rumah ibadah merupakan salah satu kasus sensitif yang dapat memicu terjadinya konflik bernuansa agama.

Selain itu, dalam menjalankan sistem respon dini, pemerintah Sumatera Selatan juga mengutamakan musyawarah dalam menghadapi kasus-kasus yang dapat memicu perpecahan umat. Musyawarah dipilih karena dapat menghindari perselisihan dan kekerasan antar pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa kasus seperti pergerakan yang disinyalir dilakukan oleh aliran-aliran kepercayaan yang masih diperdebatkan di Indonesia. Untuk

menghindari kericuhan yang mungkin akan ditimbulkan dari masyarakat yang kurang setuju terhadap aliran tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama Sumatera Selatan langsung melakukan upaya preventif dengan melakukan musyawarah dengan pihak aliran tersebut. Musyawarah dilakukan untuk memperingatkan mereka agar tidak melakukan pergerakan yang dapat memicu amarah masyarakat sekitar. Sejauh ini, cara-cara tersebut berhasil dilaksanakan di Sumatera Selatan.

Peneliti juga menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Arthur Lykke untuk menganalisis pencegahan konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan. Menurut Lykke, teori strategi sangatlah sederhana dan hanya bergantung kepada tiga faktor, yaitu: *ends*, *ways*, dan *means*.<sup>16</sup>

Menurut teori ini, strategi adalah bagaimana (*ways*) kepemimpinan menggunakan kekuasaannya demi negara. Dan sangat penting untuk memastikan keadaan dan lokasi geografis demi mencapai tujuan (*ends*) yang mendukung

---

<sup>16</sup> M. Kurtis Bans, *Strategy Development for Future Security Environment*, (Journal of Military and Information Science Vol. 3 No.3, 2015), hlm 75-77.

kepentingan nasional. Sementara itu, *means* merupakan sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, peneliti menganalisis strategi yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan menggunakan teori strategi yang digagas oleh Arthur Lykke. Adapun analisisnya yaitu:

1. Merumuskan Tujuan (Ends)

*Ends* atau *Objective* berkaitan erat dengan tujuan yang telah disesuaikan dengan dinamika perkembangan global serta memperhitungkan ancaman dan juga peluang.

Pemerintah Sumatera Selatan memiliki tujuan menjadikan Sumatera Selatan, terutama Palembang sebagai kota *zero conflict* dan sebagai kota pusat olahraga.

Untuk menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai kota olahraga, dibutuhkan dana yang besar, sementara itu menurut Achmad Najib, APBD Provinsi Sumatera Selatan hanya Rp. 8,976 triliun. Artinya, selain menggunakan APBN dan APBD, dibutuhkan kucuran dana dari berbagai investor untuk membangun

sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, mencegah konflik SARA terutama konflik bernuansa agama dan menjaga Sumatera Selatan tetap kondusif adalah salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar wilayah ini terkenal dengan *zero conflict*. Kondisi *zero conflict* tersebut tentu mengundang para investor yang membutuhkan wilayah yang aman dan kondusif untuk menanamkan modal/investasi bisnisnya.

Tujuan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga ternyata mendapat persetujuan dari masyarakat. Hal tersebut juga menjadi sebuah dukungan bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai pembangunan dengan mudah dan tanpa hambatan. Harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai kota olahraga juga berdampak pada mudahnya menjalankan strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa agama di Sumatera Selatan.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 75-77.

## 2. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya (*Means*)

Setelah merumuskan tujuan, para pembuat strategi mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam mewujudkan Sumatera Selatan *zero conflict*, Pemerintah Sumatera Selatan mempergunakan segala sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Selatan dengan optimal.

Salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah Sumatera Selatan adalah memaksimalkan penggunaan teknologi. Kemudahan teknologi yang ditawarkan sekarang ini sangat membantu kinerja pemerintah. Dengan adanya teknologi, informasi mengenai suatu insiden yang berpotensi pada konflik atau kekerasan agama dapat langsung diterima oleh pemerintah pusat atau instansi yang terkait dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga dengan adanya penyebaran informasi yang cepat tersebut sangat membantu pemerintah dalam menangani insiden tersebut.

Hal tersebut tercermin dalam penanganan kasus perusakan gereja Santo Zakaria di Rantau Alai, Ogan Ilir. Pihak Polri dan TNI mendapatkan laporan

kejadian tersebut hanya dalam waktu hitungan beberapa jam saja. Sehingga, pihak pemerintah mampu mengatasi konflik dengan tanggap dan cepat sebelum menyebar menjadi sebuah tindak kekerasan.

Selain teknologi, sarana lain yang dapat menunjang upaya pencegahan konflik bernuansa agama adalah sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Dalam mengatasi potensi konflik bernuansa agama, Sumatera Selatan melakukan upaya yang bersifat preventif. Artinya, pemerintah daerah lebih fokus dalam mencegah timbulnya potensi konflik menjadi sebuah kekerasan dan menciptakan atmosfer damai di Sumatera Selatan. Untuk menjalankan hal tersebut, Pemerintah daerah dibantu oleh berbagai pihak baik dari lembaga maupun masyarakat, terutama tokoh agama. Tokoh agama menjadi salah satu sarana penting untuk menciptakan atmosfer damai di Sumatera Selatan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Sumatera Selatan percaya bahwa ulama memiliki peran penting

yang multifungsi atau polimorfik.<sup>18</sup> Ulama dipercaya tidak hanya sebagai penceramah mengenai isu-isu agama tetapi juga dapat menjadi *problem solver* dalam bidang sosial, politik, agama, dan budaya. Sumatera Selatan memiliki banyak ulama yang mampu menginspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu sarana yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan *zero conflict* di Sumatera Selatan.

### 3. Implementasi Strategi (*Ways*)

Bagian ketiga adalah cara atau *concept*. Konsep strategi berisi cara-cara yang diformulasikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan utamanya. Dalam hal ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi *zero conflict* dengan mencegah terjadinya konflik bernuansa agama serta membangun perdamaian di Sumatera Selatan. Semua strategi yang dilakukan

pemerintah bersifat preventif, karena memang hingga saat ini belum pernah terjadi konflik atau kekerasan agama yang terjadi di Sumatera Selatan.

Cara (*ways*) dalam teori strategi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu: *strategy policy*, *strategy operational*, dan *strategy tactical*. Pada tingkatan *strategy policy*, pemerintah daerah Sumatera Selatan masih mengandalkan kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada peraturan atau kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konflik bernuansa agama. Karena memang hingga saat ini, belum ada konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Sumatera Selatan.

Untuk mencegah atau menghadapi potensi konflik bernuansa agama, pemerintah pusat memiliki Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial No. 7 tahun 2012 (UU PKS). UU PKS berisikan pedoman bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan

---

<sup>18</sup>Azhar Ali, *Definisi Ulama dan Perannya dalam Pandangan Masyarakat Palembang Era*

*Kontemporer*, (Tesis, Palembang IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 5.

penanganan konflik. penanganan konflik ini sendiri terdiri dari serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis dan terencana dalam situasi baik sebelum, pada masa, dan maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Selain itu, dalam UU PKS No. 7 tahun 2012 ini juga menjelaskan secara komprehensif mengenai tujuan penanganan konflik, ruang lingkup penanganan konflik, sumber konflik, serta sistem penanganan konflik.

Selain UU PKS No.7 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Sumatera Selatan juga menggunakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 sebagai acuan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama. PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 tersebut berisi tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama adalah menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang bersifat preventif.

Dengan adanya PBM No. 9 dan 9 tahun 2006 tersebut, pemerintah daerah Sumatera Selatan memiliki panduan yang kuat dalam menjaga kerukunan umat beragama. Selain masalah kerukunan umat beragama, masalah lain yang sering sekali terjadi di Indonesia adalah sengketa pembangunan rumah ibadat. Sumatera Selatan sendiri beberapa kali menghadapi sengketa pembangunan rumah ibadat. Namun dengan adanya PBM yang mengatur masalah pembangunan rumah ibadat, pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat dengan mengacu pada PBM tersebut.

Cara (*ways*) yang kedua yaitu terkait *strategy operational*. *Strategy operational* merupakan kelanjutan dari kebijakan atau undang-undang tersebut di atas yang berisikan rencana-rencana yang harus dijalankan. *Strategy operational* dalam tingkat provinsi diatur



oleh gubernur. Dalam hal upaya pencegahan konflik bernuansa agama, gubernur Sumatera Selatan memiliki beberapa *strategy operational*. Adapun diantaranya yaitu:

- a. Menumbuhkan jiwa toleransi dalam masyarakat

Toleransi merupakan modal utama dalam menjaga harmonisasi kehidupan antar umat beragama. Toleransi umat beragama dimaknai sebagai pemberian kebebasan pada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di dalam menjalankan dan menentukan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

Secara historis, tingginya tingkat toleransi beragama di Sumatera Selatan telah mengakar sejak berabad yang lalu. Pada masa keemasan kerajaan Sriwijaya, wilayah yang sekarang dikenal dengan Sumatera Selatan ini banyak dikunjungi oleh pedagang asing yang memiliki latar

belakang agama yang berbeda (Arab, Cina, India). Sehingga keberagaman masyarakat di Sumatera Selatan telah tercipta sejak lama. Keberagaman tersebut juga memberikan efek munculnya kehidupan yang toleran di bumi Sriwijaya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran raja Sriwijaya yang melindungi dan menghormati keberagaman masyarakatnya. Dengan adanya historis tingginya tingkat toleransi di Sumatera Selatan tersebut, mempermudah pemerintah daerah dalam menerapkan nilai-nilai toleransi di Sumatera Selatan. Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah daerah berhenti untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi.

Dalam setiap kesempatan, pemerintah daerah Sumatera Selatan selalu mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang arti pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Oleh karena itu, poin menumbuhkan jiwa toleransi menjadi

salah satu *plan* dalam *strategy operational* pemerintah daerah.

b. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Hal tersebut dikarenakan kualitas umat beragama di Indonesia belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik di antara umat beragama. Oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya.

Namun tidak hanya sebatas kerukunan antar umat beragama. Pemerintah daerah juga mengupayakan untuk menjaga tri

kerukunan, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar ulama dan pemerintah daerah. Ketiga kerukunan tersebut penting untuk dijaga agar tercipta kerukunan yang komprehensif di seluruh lini kehidupan.

Cara (*ways*) yang ketiga yaitu terkait *strategy tactical*. *Strategy tactical* merupakan serangkaian agenda yang dilakukan untuk menjalankan *strategy operational* yang telah dimaksud di atas guna mencapai tujuan utama dari perumusan strategi ini. Adapun *strategy tactical* yang selama ini telah ditempuh oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan untuk mencegah konflik bernuansa agama dan mempertahankan status *zero conflict* adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sumatera Selatan adalah mengadakan sosialisasi terkait bahaya terorisme dan radikalisme. Belakangan ini, konflik bernuansa agama di Indonesia sangat berkaitan

erat dengan terorisme dan radikalisme. Untuk itu, diperlukan adanya sosialisasi menyeluruh ke semua elemen masyarakat mengenai bahaya terorisme dan radikalisme. Hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari paham radikalisme yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan dibantu dengan instansi-instansi lain yang terkait.

Pemerintah Sumatera Selatan juga sering menggelar rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) se-Sumsel. Rapat tersebut digelar dalam rangka penanganan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta terorisisme di Sumsel. Selain untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi antara aparatur pemnerintah serta persiapan reaksi dini, rapat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas para aparatur pemerintah untuk mewaspadaai sejak dini munculnya konflik SARA dan terorisme.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi ke berbagai forum kepemudaan agar para pemuda Sumatera Selatan tidak mudah terpengaruh paham ekstrimis tersebut. Pada tahun 2018 ini, Sosialisasi atau workshop Aksi Terpadu penanganan Konflik Sosial Pemuda Mahasiswa telah dilangsungkan di Hotel 101 Palembang pada tanggal 27-29 Maret 2018. Sosialisasi tersebut diikuti 40 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa organisasi pemuda seperti IPNU, Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor, PII, HMI, PMII, GMKI, PKKD, DPD Peradah (Hindu), Sekber PMVBI (Buddha), dan OKP kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Para peserta menerima pembinaan atau materi dari pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel, Ketua FKUB Sumsel, dan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sumsel. Dalam kesempatan tersebut, para pemuda mendapatkan banyak materi positif yang dapat menjadi penangkal tumbuhnya paham radikalisme.

Sosialisasi juga dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Selatan kepada FKUB tingkat kota/kabupaten. Hal ini penting dilaksanakan agar FKUB yang memegang peran penting dalam menjaga kerukunan umat, dapat memahami pentingnya mewaspadaai bahaya terorisme dan radikalisme. Sehingga ketika anggota FKUB turun ke masyarakat atau melakukan sosialisasi ke masyarakat, mereka dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan benar.

b. Optimalisasi peran lembaga keagamaan

Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan, hal tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian konflik antar umat beragama.

Di samping itu, pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri dalam menciptakan *ukhuwah* (persatuan dan kesatuan) yang hakiki, tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam

masyarakat sebagai perekat kerukunan antar umat beragama. Sama halnya dengan provinsi lain di Indonesia, Sumatera Selatan memiliki banyak lembaga atau organisasi keagamaan. Salah satu organisasi yang fokus menangani masalah kerukunan umat beragama adalah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Dalam hal ini, FKUB menjadi wadah utama bagi terciptanya kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan dan memaksimalkan fungsi FKUB di semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Salah satu peran yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan yaitu dengan mengadakan dialog keagamaan. Dialog ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antar umat beragama sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya gesekan antar umat beragama di Sumatera Selatan. Dialog lintas agama tidak hanya dilakukan pada level ulama/petinggi keagamaan, tetapi

juga dengan umat di lapisan bawah untuk memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama.

- c. Peningkatan sinergitas antar lembaga
- Dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang aman dan kondusif, tentu diperlukan adanya kerjasama antar lembaga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya mencegah terjadinya konflik bernuansa agama. Untuk menjaga kondusivitas dan keamanan wilayah secara umum dibutuhkan adanya sinergitas dari pemerintah-TNI-Polri. Hal tersebut dikarenakan TNI dan Polri memegang peran sentral dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat menggerogoti keamanan wilayah. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dalam Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2018.

Salah satu bentuk sinergitas yang dilakukan oleh TNI dan Polri di

Sumatera Selatan yaitu terkait insiden perusakan gereja Santo Zakaria di Rantau Alai, Ogan Ilir yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 01.00 dini hari. Pada pagi harinya, jajaran Polri dan TNI langsung bekerjasama dengan melakukan penjagaan dan olah TKP untuk menghindari kejadian-kejadian lanjutan yang tidak diinginkan.<sup>19</sup> TNI dan Polri dalam hal ini juga menjalankan sistem deteksi dini dan respon dini. Untuk deteksi dini, Polda Sumatera Selatan memiliki badan Intelkam yang menjalankan tugas intelijen untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan oleh instansi. Kemudian selanjutnya apabila terdapat informasi sebuah konflik terjadi, dalam hal ini mengenai konflik bernuansa agama, Polda Sumatera Selatan kemudian dengan cepat merespon insiden tersebut sebelum insiden meluas menjadi kekerasan fisik.

Selain sinergitas yang dilakukan antara TNI-Polri, sinergitas tersebut juga terjadi antar lembaga lain seperti

---

<sup>19</sup> Detik.com, “Kronologi Perusakan Gereja di Sumsel hingga Pelaku Ditangkap”, dalam [https://news.detik.com/berita/d-](https://news.detik.com/berita/d-3926165/kronologi-perusakan-gereja-di-sumsel-hingga-pelaku-ditangkap)

[3926165/kronologi-perusakan-gereja-di-sumsel-hingga-pelaku-ditangkap](https://news.detik.com/berita/d-3926165/kronologi-perusakan-gereja-di-sumsel-hingga-pelaku-ditangkap) diakses pada 5 Desember 2018.

antara Kesbangpol Sumatera Selatan, Kanwil Kemenag Sumsel, dan FKUB Sumatera Selatan yang saling bersinergi mengatasi berkenaan dengan perselisihan pembangunan rumah ibadat. Karena selama ini, konflik yang terjadi di Sumatera Selatan baru sebatas perselisihan pendirian rumah ibadat.

Sinergitas antar lembaga yang sangat solid ini sangat membantu pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mencegah konflik bernuansa agama. Hal ini juga yang mengantarkan pemerintah daerah meraih peringkat 3 dalam upaya pencegahan konflik sosial dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- d. Kesigapan dalam mengatasi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat

Salah satu aksi dalam *strategy tactical* pemerintah daerah Sumatera Selatan yaitu adanya kesigapan dari segala lini dalam mengatasi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat. Pemerintah daerah menginginkan adanya aparat lembaga yang bersifat

responsif akan segala potensi konflik bernuansa agama yang muncul di Sumatera Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari meluapnya konflik menjadi sebuah kekerasan yang dapat melukai persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Selatan yang telah terjalin dengan harmonis.

Kesigapan ini juga berbanding lurus dengan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Karena koordinasi yang cepat antar instansi menjadi salah satu kunci dalam penanganan potensi konflik. Selain koordinasi resmi yang rutin, koordinasi tidak resmi menjadi langkah utama menghadapi hambatan birokrasi. Di samping itu, penggunaan teknologi (SMS, WA group, email) sangat membantu penyebaran informasi bagi kebutuhan koordinasi seluruh instansi. Rencana-rencana aksi dan pemetaan potensi konflik dilaksanakan secara rutin dan diperbaharui terus-menerus. Para pimpinan juga tidak segan-segan turun untuk memastikan penanganan konflik telah sesuai, dengan kesigapan

tinggi, bahkan waktu penanganan kurang dari 24 jam sebelum konflik meluas.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka terdapat dua kesimpulan yang didapat. **Pertama**, Sumatera Selatan hingga saat ini belum pernah menghadapi konflik SARA terutama konflik bernuansa agama. Kondisi tersebut dikenal dengan *zero conflict*. Kondisi *zero conflict* mengacu pada situasi damai di Sumatera Selatan yang hanya sebatas terbebas dari timbulnya kekerasan langsung/ konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan masih berada pada level damai negatif.

**Kedua**, Pemerintah daerah Sumatera Selatan menyusun dan mengimplementasikan strategi melalui tiga tahap. Langkah pertama yaitu menetapkan tujuan. Dalam hal ini pemerintah daerah menetapkan Sumatera Selatan *zero conflict* sebagai tujuan utama dilakukannya upaya pencegahan konflik bernuansa agama. Langkah kedua yaitu dengan memberdayakan sarana dan prasarana yang

ada demi mencapai tujuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan teknologi yang dapat menyampaikan informasi secara cepat sehingga setiap potensi konflik bernuansa agama yang muncul dapat ditangani dengan cepat juga. Selain itu, pemerintah daerah juga memberdayakan sumber daya manusia (SDM). SDM yang kompeten menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam upaya pencegahan konflik bernuansa agama. Langkah ketiga yaitu merumuskan serangkaian cara untuk mencegah konflik bernuansa agama. Dalam tahapan ini terbagi lagi menjadi tiga yaitu level *strategy policy*, level *strategy operational*, dan level *strategy tactical*. Pada level *strategy policy*, pemerintah daerah Sumatera Selatan menggunakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat sebagai acuan dalam mencegah konflik bernuansa agama.

Pada level *strategy operational* pemerintah daerah Sumatera Selatan merumuskan beberapa rancangan yaitu seperti: menumbuhkan jiwa toleransi di masyarakat dan meningkatkan kerukunan beragama dalam masyarakat. Sementara itu, pada level *strategy tactical*, pemerintah daerah menerapkan beberapa cara yang

dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik bernuansa agama, yaitu: mengadakan sosialisasi tentang bahaya terorisme dan radikalisme, optimalisasi peran lembaga keagamaan, meningkatkan sinergitas antar lembaga di Sumatera Selatan serta meningkatkan kesigapan dalam mengatasi konflik yang berpotensi pada perpecahan umat.

### **Rekomendasi**

Dalam penulisan ini, masih terdapat banyak kekurangan. Penulis mengharapkan agar dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan mendalam berkaitan dengan strategi pencegahan konflik dan kondisi *zero conflict* sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu: **pertama**, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu meningkatkan kondisi masyarakat Sumatera Selatan dengan menciptakan damai positif di Sumatera Selatan. Bukan hanya sebatas membangun damai negatif atau meniadakan serta menekan konflik/kekerasan bernuansa agama. Untuk membangun damai positif, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menjunjung tinggi keadilan. **Kedua**, dalam rangka menghadapi konflik sosial di Sumatera Selatan, dibutuhkan penataran atau pelatihan mengenai konflik sosial terhadap para aktor penanganan konflik sosial. Karena untuk dapat menyelesaikan konflik hingga ke akarnya, tentu dibutuhkan adanya pengetahuan yang cukup mengenai konflik sosial. **Ketiga**, Pemerintah daerah Sumatera Selatan juga perlu memformulasikan sistem peringatan dini dan respon dini secara komprehensif. Hal tersebut sangat berguna untuk menghadapi potensi konflik yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat Sumatera Selatan di masa depan. Karena selama ini, sistem peringatan dan respon dini yang terlaksana di Sumatera Selatan hanya sebatas menjalankan sistem yang berguna untuk menghadapi konflik yang terjadi di masa sekarang saja.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdullah, Taufik (ed.) 1987. *Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Anwar, Dewi Fortuna. 2005. *Konflik Kekerasan Internal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2017. *Provinsi Sumatera Selatan dalam*



Angka tahun 2017. Palembang: BPS Sumatera Selatan.

Perwiranegara, Alamsjah Ratu. 1982. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama

### Jurnal

Bans, M. Kurtis. 2015. "Strategy Development for Future Security Environment". *Journal of Millitary and Information Science* Vol. 3 No.3, 2015.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2012. "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia: Signifikasi Model Resolusi Berbasis Teologi Transformatif". *Analisis, Volume XII, Nomor 2, Desember 2012*.

Santosa, Bend Abidin. 2017. "Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik". *Jurnal Aspikom Volume 3 Nomor 2 Januari 2017*.

### Tesis/Disertasi

Ali, Azhar. 2010. "Definisi Ulama dan Perannya dalam Pandangan Masyarakat Palembang Era Kontemporer". *Tesis Magister*. Palembang: IAIN Raden Fatah.

### Website

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Profil Provinsi Sumatera Selatan", dalam <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/Profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> diakses pada 22 Juli 2018.

Central Intelligence Agency, "The World Factbook", dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>, diakses pada 7 Agustus 2018.

Detik.com, "Kronologi Perusakan Gereja di Sumsel hingga Pelaku Ditangkap", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3926165/kronologi-perusakan-gereja-di-sumsel-hingga-pelaku-ditangkap> diakses pada 5 Desember 2018.

Nefri Inge. Liputan 6, "22 Pelaku Kriminalitas di Sumsel Ditembak Mati Sepanjang 2018", dalam <http://www.liputan6.com/pelaku-kriminalitas-di-sumsel-ditembak-mati-sepanjang-2018/> diakses pada 7 Desember 2018.

Tribun News, "Wiranto puji Alex Noerdin Wujudkan Sumatera Selatan Zero Conflict", dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/09/29/wiranto-puji-alex-noerdin-wujudkan-sumatera-selatan-zero-conflict> diakses pada 20 November 2018.

